

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2021



BALAI
PENGELOLA
ALIH
TEKNOLOGI
PERTANIAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2021



LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

2021



BALAI
PENGELOLA
ALIH
TEKNOLOGI
PERTANIAN

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2021



Jln. Salak Nomor 22-Bogor
16151 Jawa Barat



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 31 Desember 2021
Ketua Pengguna Anggaran,



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
NIP. 196411211991031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
NIP. 196411211991031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.460.005.172,00 atau mencapai 100,63% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.438.312.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp11.770.007.532,00 atau mencapai 98,56% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.942.391.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp35.662.092.689,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.165.053.595,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp34.495.301.959,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.737.135,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp35.662.092.689,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.453.259.372,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp11.207.337.105,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7.810.719.726,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp6.745.800,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.803.973.926,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp36.252.150.412,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7.803.973.926,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.213.916.203,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp35.662.092.689,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	3.438.312.000,00	3.460.005.172,00	100,63	3.668.237.657,00
Jumlah Pendapatan		3.438.312.000,00	3.460.005.172,00	100,63	3.668.237.657,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	1.514.000.000,00	1.415.144.937,00	93,47	1.368.781.290,00
Belanja Barang	B.4.	8.345.863.000,00	8.284.020.595,00	99,26	6.469.634.568,00
Belanja Modal	B.5.	2.082.528.000,00	2.070.842.000,00	99,44	1.017.999.656,00
Jumlah Belanja		11.942.391.000,00	11.770.007.532,00	98,56	8.856.415.514,00

II. NERACA

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	2.104.179.191,00	2.160.821.184,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-1.052.089.596,00	-216.082.118,00
Persediaan	C.1.3.	112.964.000,00	105.861.800,00
Jumlah Aset Lancar		1.165.089.595,00	2.050.600.866,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	27.990.850.000,00	27.990.850.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8.458.937.403,00	7.920.441.559,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	5.210.232.000,00	4.860.189.000,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	39.792.100,00	39.792.100,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-7.204.509.544,00	-6.611.477.392,00
Jumlah Aset Tetap		34.495.301.959,00	34.199.795.267,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	55.290.000,00	55.290.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-53.552.865,00	-53.535.721,00
Jumlah Aset Lainnya		1.737.135,00	1.754.279,00
Jumlah Aset		35.662.092.689,00	36.252.150.412,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	35.662.092.689,00	36.252.150.412,00
Jumlah Ekuitas		35.662.092.689,00	36.252.150.412,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		35.662.092.689,00	36.252.150.412,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	3.396.617.379,00	4.481.873.840,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.396.617.379,00	4.481.873.840,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	1.415.144.937,00	1.368.781.290,00
Beban Persediaan	D.3.	813.426.700,00	628.789.650,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	5.087.886.428,00	3.908.931.528,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	723.809.048,00	983.523.400,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.656.646.219,00	1.029.648.890,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	1.358.329.705,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	0,00	37.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	674.416.295,00	673.655.173,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10.	836.007.478,00	209.516.846,00
JUMLAH BEBAN		11.207.337.105,00	10.198.176.482,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6.918.070.255,00	-5.716.302.642,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11.	0,00	31.320.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	6.745.800,00	27.213.050,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11.	0,00	20.137.800,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		6.745.800,00	38.395.250,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-7.803.973.926,00	-5.677.907.392,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	36.252.150.412,00	38.490.873.418,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7.803.973.926,00	-5.677.907.392,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-54.879.961,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	-54.879.961,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7.213.916.203,00	3.494.064.347,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-590.057.723,00	-2.238.723.006,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	35.662.092.689,00	36.252.150.412,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian didirikan sebagai salah satu Satuan Kerja (Satker) dilingkungan Badan Litbang Pertanian yang memiliki mandat untuk melakukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Kerjasama Alih Teknologi Pertanian dalam upaya penyebarluasan teknologi untuk tercapainya swasembada pangan berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.438.312.000,00	3.438.312.000,00
Jumlah Pendapatan	3.438.312.000,00	3.438.312.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.496.000.000,00	1.496.000.000,00
Belanja Lembur	18.000.000,00	18.000.000,00
Belanja Barang Operasional	1.330.463.000,00	1.724.593.000,00
Belanja Barang Non Operasional	3.553.995.000,00	2.737.408.000,00
Belanja Barang Persediaan	665.000.000,00	833.730.000,00
Belanja Jasa	1.763.400.000,00	681.821.000,00
Belanja Pemeliharaan	812.261.000,00	710.861.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.378.500.000,00	1.657.450.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	958.983.000,00	1.729.494.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.034.000,00	353.034.000,00
Jumlah Belanja	13.329.636.000,00	11.942.391.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.460.005.172,00 atau mencapai 100,63% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.438.312.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	0,00	14.947.000,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0,00	6.745.800,00	0,00
Pendapatan Royalti atas kekayaan intelektual	3.438.312.000,00	3.438.312.372,00	100,00

Jumlah	3.438.312.000,00	3.460.005.172,00	100,63
--------	------------------	------------------	--------

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -5,68% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	14.947.000,00	47.420.000,00	-68,48
Pendapatan Denda	0,00	318.000,00	- 100,00
Pendapatan Lain-Lain	6.745.800,00	2.810.750,00	140,00
Pendapatan Royalti atas kekayaan intelektual	3.438.312.372,00	3.617.688.907,00	-4,96
Jumlah	3.460.005.172,00	3.668.237.657,00	-5,68

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.6.745.800,- (pendapatan dari tunjangan jabatan fungsional peneliti), pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp.14.947.000,- dan pendapatan dari royalti sebesar Rp.3.438.312.372,-.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp11.770.007.532,00 atau 98,56% dari anggaran belanja sebesar Rp11.942.391.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	1.514.000.000,00	1.415.144.963,00	93,47
Belanja Barang	8.345.863.000,00	8.284.020.595,00	99,26
Belanja Modal	2.082.528.000,00	2.070.842.000,00	99,44
Total Belanja Kotor	11.942.391.000,00	11.770.007.558,00	98,56
Pengembalian Belanja		-26,00	0.00
Total Belanja	11.942.391.000,00	11.770.007.532,00	98,56

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 32,90% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. adanya perubahan kegiatan dan percepatan serapan anggaran
2. adanya pengembalian belanja pegawai dari pembulatan gaji PNS sebesar Rp.26,-.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	1.415.144.937,00	1.368.781.290,00	3,39
Belanja Barang	8.284.020.595,00	6.469.634.568,00	28,04
Belanja Modal	2.070.842.000,00	1.017.999.656,00	103,42
Total Belanja	11.770.007.532,00	8.856.415.514,00	32,90

Berikut penjelasan Belanja Barang penanganan COVID 19:

KDKEGIATAN	KDO UTP UT	AKUN	NM AKUN	REVISI DIPA	BELANJA	SISA	PENGGUNAAN BELANJA *Merujuk pada SE DJPB.0369_2020
1809.EAA.994	002	521131	- Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh	238.824.000	238.823.400	600	
1809.EAA.994	002	521841	- Biaya paket data dan komunikasi	204.475.000	204.475.000	0	
1809.EAA.994	002	522192	- Penyemprotan desinfektan area kantor Pembelian masker dan handsanitizer Rapid test dan PCR	18.775.000	15.380.000	3.395.000	

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.415.144.937,00 dan Rp1.368.781.290,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,39% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. adanya pegawai yang diangkat menjadi jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN a.n. Ade Rachmat Santosa, S.Sos
2. adanya pengembalian belanja pegawai dari pembulatan gaji PNS sebesar Rp.26 a.n. Kursi

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.397.244.963,00	1.354.671.290,00	3,14
Belanja Lembur	17.900.000,00	17.750.000,00	0,85
Jumlah Belanja Kotor	1.415.144.963,00	1.372.421.290,00	3,11
Pengembalian Belanja Pegawai	-26,00	-3.640.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	1.415.144.937,00	1.368.781.290,00	3,39

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.284.020.595,00 dan Rp6.469.634.568,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 28,04% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. adanya percepatan serapan anggaran dan perubahan jadwal kegiatan

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.719.188.650,00	1.249.591.680,00	37,58
Belanja Barang Non Operasional	2.736.399.565,00	2.169.143.850,00	26,15
Belanja Barang Persediaan	833.478.900,00	571.879.000,00	45,74
Belanja Jasa	627.448.213,00	490.195.998,00	28,00
Belanja Pemeliharaan	710.859.048,00	959.175.150,00	-25,89
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.656.646.219,00	1.029.648.890,00	60,89
Jumlah Belanja Kotor	8.284.020.595,00	6.469.634.568,00	28,04

Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	8.284.020.595,00	6.469.634.568,00	28,04

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.070.842.000,00 dan Rp1.017.999.656,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 103,42% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa berupa renovasi gedung kantor
2. pengadaan ruang operasional AWR
3. pengadaan peralatan dan mesin untuk operasional AWR
4. pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
5. pengadaan kendaraan dinas roda 4

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.720.799.000,00	1.017.999.656,00	69,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.043.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	2.070.842.000,00	1.017.999.656,00	103,42
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	2.070.842.000,00	1.017.999.656,00	103,42

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.720.799.000,00 dan Rp1.017.999.656,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 69,04% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. percepatan proses pengadaan operasional AWR
2. pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
3. pengadaan kendaraan roda 4

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.720.799.000,00	1.017.999.656,00	69,04
Jumlah Belanja Kotor	1.720.799.000,00	1.017.999.656,00	69,04
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.720.799.000,00	1.017.999.656,00	69,04

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp350.043.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. adanya renovasi gedung kantor
2. adanya pengembangan ruang operasional AWR

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.043.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	350.043.000,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	350.043.000,00	0,00	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.104.179.191,00 dan Rp2.160.821.184,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.104.179.191,00	2.160.821.184,00
Jumlah	2.160.821.184,00	2.160.821.184,00

Terdapat temuan BPK RI atas keterlambatan pembayaran royalti/ piutang bukan pajak pada tahun 2019 sebesar Rp1.313.053.251,00 dan tahun 2020 sebesar Rp1.187.395.862,00 selanjutnya pada tahun 2020 ada cicilan royalti yang masuk sebesar Rp23.885.612,00 dan Rp315.743.317,00 sehingga piutang bukan pajak pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp2.160.821.184,00. Hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kementerian Pertanian tahun 2019 dan tahun 2020 di Balai PATP dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan royalti tahun 2019 dipotong pajak penghasilan (PPh) oleh perusahaan/ mitra sebesar Rp1.752.849.931,85 dan diantaranya sebesar Rp750.802.21,41 belum didukung dengan Surat Setoran Pajak (SSP) serta pendapatan royalti yang belum diterima oleh BPATP sebesar Rp1.159.744.301,00 dan pada tahun 2018 sebesar Rp153.308.950 yang belum dibayarkan.
- Potensi kekurangan penerimaan negara atas potongan pajak dari pendapatan royalti tahun 2019 yang belum didukung bukti setor pajaknya ke kas negara sebesar Rp750.802.261,41.

Terdapat denda yang belum dikenakan kepada perusahaan mitra yang terlambat menyetorkan pendapatan royalti sebesar Rp473.02.843,67.

Pada tahun 2021 ada setoran terkait temuan tersebut sebesar Rp.73.595.550 dan temuan Itjen sebesar Rp.16.953.557, Balai PATP telah melakukan penagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perjanjian lisensi yang ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu berkoordinasi dengan auditor BPK RI dan Inspektorat Jenderal 3 untuk mendampingi proses penagihan dan penyelesaian pendapatan royalti tersebut, namun dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, perusahaan yang

menanggihkan dan tidak sanggup membayar pendapatan royalti. Balai PATP telah dan sedang berkoordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor bagian penilaian dan pengurusan *piutang* negara untuk menyelesaikan/melimpahkan permasalahan hutang tersebut.

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1.052.082.596,00 dan Rp-216.082.118,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	-1.052.089.596	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp112.964.000,00 dan Rp105.861.800,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	112.214.000,00	105.836.800,00
Bahan untuk Pemeliharaan	750.000,00	25.000,00
Jumlah	112.964.000,00	105.861.800,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.990.850.000,00 dan Rp27.990.850.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.458.937.403,00 dan Rp7.920.441.559,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	7.920.441.559,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.715.949.000,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	-1.177.453.156,00
Saldo per 31 Desember 2021	8.458.937.403,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-6.682.672.725,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.776.264.678,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi tambah dari pembelian kendaraan roda 4 untuk operasional berupa 1 unit mobil kijang Innova sebesar Rp. 328.000.000
2. Mutasi tambah berasal dari pembelian kursi kerja 15 Unit, rak display promosi 2 unit, AC 2 PK 2 unit, AC 1 PK 2 unit, peralatan poliklinik 1 set, kursi rapat 15 unit, nabual mobile file 1 unit, kursi sofa tamu 1 unit dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 164.400.000.
3. Mutasi tambah berasal dari pembelian logitech video conference cam 2 unit, LED TV LG 2 unit, perangkat komputer 3 unit, tablet Samsung galaxy 1 unit, bracket wall dan kabel HDMI 2 unit dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 144.350.000.
4. Mutasi tambah berasal dari pembelian 1 unit sepeda motor sebesar Rp.25.438.000.
5. Mutasi tambah berasal dari pembelian kursi kerja sebesar Rp.10.000.000.
6. Mutasi tambah berasal dari pembelian TV, Laptop dan standing bracket sebesar Rp.82.618.000.

7. Mutasi tambah berasal dari pembelian peralatan pendukung AWR sebesar Rp.170.819.000.
8. Mutasi tambah berasal dari pembelian implement DH267L sebesar Rp.90.000.000.
9. Mutasi tambah berasal dari pembelian alat seed treatmen sebesar Rp.97.680.000.
10. Mutasi tambah berasal dari pembelian Kubota tractor sebesar Rp.199.529.000.
11. Mutasi tambah berasal dari pembelian 2 unit komputer, 1 unit laptop, 1 unit galaxy S7, 2 unit galaxy S6 dan 2 unit printer sebesar Rp.84.138.000.
12. Mutasi tambah berasal dari pembelian AC split 2 PK dan 1 PK sebesar Rp.53.900.000.
13. Mutasi tambah berasal dari pembelian kerangka intake raw material, conveyor meja sortir dan conveyor intake sortir sebesar Rp.128.865.000.
14. Mutasi tambah berasal dari pembelian 1 paket CCTV berikut instalasi sebesar Rp.141.062.000.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.210.232.000,00 dan Rp4.860.189.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	4.860.189.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	350.043.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	5.210.232.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-521.836.819,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	4.688.395.181,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi tambah berasal dari pengembangan ruang operasional AWR sebesar Rp. 141.224.000, dan Perencana dan pengawas sebesar Rp. 12.221.000.
2. Pengadaan renovasi gedung dan bangunan Balai PATP sebesar Rp.184.120.000 dan Perencana dan pengawas sebesar Rp. 12.478.000,-

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp39.792.100,00 dan Rp39.792.100,00 berupa koleksi buku perpustakaan diruang perpustakaan Balai PATP.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-7.204.509.544,00 dan Rp-6.611.477.392,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8.458.937.403,00	-6.682.672.725,00	1.776.264.678,00
2.	Gedung dan Bangunan	5.210.232.000,00	-521.836.819,00	4.688.395.181,00
3.	Aset Tetap Lainnya	39.792.100,00	0,00	39.792.100,00
Akumulasi Penyusutan		13.708.961.503,00	-7.204.509.544,00	6.504.451.959,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp55.290.000,00 dan Rp55.290.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Aset Tak Berwujud Lainnya	700.000,00
Hak Cipta	1.200.000,00
Software	53.390.000,00

Jumlah	55.290.000,00
--------	---------------

Permasalahan Aset Tak Berwujud (ATB) di Balai PATP masih dalam proses dan penyusunan Petunjuk Umum untuk tingkat Kementerian Pertanian dan Petunjuk Teknis untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Telah dilakukan pertemuan antara pihak Biro Keuangan dan BMN, Inspektorat Jenderal 3 Kementan, Badan Litbang Pertanian dan Balai PATP untuk membuat Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis ATB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.05/2019 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 14 Tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud dan saat ini dalam proses penyusunan di Kementerian Pertanian. Aset Tak Berwujud berupa software masih dalam kondisi baik dan digunakan diruang server Balai PATP.

C.4.2.

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-53.552.865,00 dan Rp-53.535.721,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	55.290.000,00	-53.390.000,00	1.900.000,00
Akumulasi Penyusutan		55.290.000,00	-53.552.865,00	1.737.135,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.554.742.160,00 dan Rp36.252.150.412,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.453.259.372,00 dan Rp4.481.873.840,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	318.000,00	-100,00
Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	3.438.312.372,00	4.465.455.840,00	-23,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.947.000,00	16.100.000,00	-7,16
Jumlah	3.453.259.372,00	4.481.873.840,00	-22,95

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal yang bersumber dari pendapatan royalti atas kekayaan intelektual (Royalti hasil kerjasama dengan pihak ke tiga) per 31 Desember tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -22,95% dibandingkan pendapatan per 31 Desember tahun 2020, hal ini disebabkan karena pandemic covid 19, pendapatan royalti sebesar Rp 3.438.312.372,00 dan pendapatan sewa lahan sebesar Rp.14.947.000,-

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.415.144.937,00 dan Rp1.368.781.290,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.026.576.880,00	984.876.400,00	4,23
Beban Pembulatan Gaji PNS	14.545,00	15.388,00	-5,48

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Anak PNS	20.013.992,00	20.799.816,00	-3,78
Beban Tunj. Beras PNS	53.952.900,00	46.928.160,00	14,97
Beban Tunj. Fungsional PNS	27.640.000,00	25.520.000,00	8,31
Beban Tunj. PPh PNS	2.716.750,00	2.674.006,00	1,60
Beban Tunj. Struktural PNS	26.280.000,00	32.760.000,00	-19,78
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	65.172.870,00	64.496.520,00	1,05
Beban Tunjangan Umum PNS	39.220.000,00	36.600.000,00	7,16
Beban Uang Lembur	17.900.000,00	17.750.000,00	0,85
Beban Uang Makan PNS	135.657.000,00	136.361.000,00	-0,52
Jumlah	1.415.144.937,00	1.368.781.290,00	3,39

Dikarenakan adanya pengangkatan jabfung keuangan sebanyak 1 orang sehingga mengalami kenaikan sebesar 3,39 persen.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp813.426.700,00 dan Rp628.789.650,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	123.367.750,00	70.507.900,00	74,97
Beban Persediaan konsumsi	690.058.950,00	425.811.750,00	62,06
Beban persediaan lainnya	0,00	132.470.000,00	-100,00
Jumlah	813.426.700,00	628.789.650,00	29,36

Beban persediaan bahan baku sebesar Rp123.367.750,00 dan beban persediaan konsumsi sebesar Rp.690.058.950,00 mengalami kenaikan sebesar 29,36 persen.

D.4. **Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.087.886.428,00 dan Rp3.908.931.528,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4.850.000,00	0,00	0,00
Beban Bahan	373.228.565,00	298.152.850,00	25,18
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.144.071.000,00	1.715.256.000,00	25,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	238.823.400,00	59.176.680,00	303,58
Beban Barang Operasional Lainnya	26.819.000,00	26.819.000,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	177.360.000,00	165.250.000,00	7,33
Beban Honor Output Kegiatan	219.100.000,00	155.735.000,00	40,69
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	15.380.000,00	112.494.000,00	-86,33
Beban Jasa Lainnya	269.004.284,00	55.705.000,00	382,91
Beban Jasa Profesi	177.300.000,00	132.050.000,00	34,27
Beban Keperluan Perkantoran	1.227.432.250,00	952.477.500,00	28,87
Beban Langganan Air	52.103.600,00	62.092.600,00	-16,09
Beban Langganan Listrik	86.378.259,00	86.913.503,00	-0,62
Beban Langganan Telepon	2.482.070,00	3.840.895,00	-35,38
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.000.000,00	35.994.500,00	0,02
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.754.000,00	9.874.000,00	29,17
Beban Sewa	24.800.000,00	37.100.000,00	-33,15
Jumlah	5.087.886.428,00	3.908.931.528,00	30,16

Beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 30,16% seperti beban bahan, barang non operasional lainnya, belanja covid, beban jasa profesi dan honor output kegiatan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp723.809.048,00 dan Rp983.523.400,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	318.646.848,00	557.420.000,00	-42,84
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	9.575.000,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	392.212.200,00	392.180.150,00	0,01
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	25.000,00	7.375.000,00	-99,66
Beban Persediaan suku cadang	12.925.000,00	16.973.250,00	-23,85
Jumlah	723.809.048,00	983.523.400,00	-26,41

Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar -26,41% dari biaya pemeliharaan berupa pemeliharaan gedung dan bangunan, suku cadang.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.656.646.219,00 dan Rp1.029.648.890,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.304.565.921,00	830.208.890,00	57,14
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	35.760.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	12.280.000,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	47.400.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	352.080.298,00	104.000.000,00	238,54
Jumlah	1.656.646.219,00	1.029.648.890,00	60,89

Beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 60,89% dikarenakan percepatan kegiatan yang sudah direncanakan.

D.8. **Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.395.329.705,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	1.358.329.705,00	-100,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0,00	37.000.000,00	-100,00
Jumlah	0,00	1.395.329.705,00	-100,00

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda mengalami penurunan sebesar -100 % dikarenakan di TA 2021 tidak adanya bantuan pemerintah pada kegiatan di Balai PATP.

D.9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp674.416.295,00 dan Rp673.655.173,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Hak Cipta	17.144,00	17.144,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	126.713.384,00	117.501.726,00	7,84
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	547.685.767,00	556.136.303,00	-1,52
Jumlah	674.416.295,00	673.655.173,00	0,11

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 0,11% dikarenakan percepatan proses pengadaan barang/jasa.

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp209.516.846,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNB	0,00	209.516.846,00	-100,00
Jumlah	0,00	209.516.846,00	-100,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih mengalami penurunan sebesar -100,00% dikarenakan tidak ada setoran pada tahun anggaran 2021..

D.11. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-20.137.800,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	24.402.300,00	-100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	31.320.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6.745.800,00	2.810.750,00	140,00
Jumlah	6.745.800,00	38.395.250,00	-82,43

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasioanal mengalami penurunan sebesar - 82,43% dikarenakan dampak pandemi covid 19.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.554.742.160,00 dan Rp36.252.150.412,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-7.803.973.926,00 dan Rp-5.677.907.392,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-54.879.961,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-54.879.961,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.213.916.203,00 dan Rp3.494.064.347,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	11.770.007.532,00
Diterima dari Entitas Lain	-3.460.005.172,00
Transfer Keluar	-1.096.086.157,00
Jumlah	7.213.916.203,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-3.460.005.172,00 sedangkan DKEL sebesar Rp11.770.007.532,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp-1.096.086.157,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018090200648680000KD	-10.924.500,00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018090200648680000KD	1.365.563,00
3.	Peralatan dan Mesin	018091900238080000KD	-941.328.656,00
4.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018091900238080000KD	80.001.436,00
5.	Peralatan dan Mesin	018092900537628000KD	-225.200.000,00
Jumlah			-1.096.086.157,00

Transfer keluar peralatan dan mesin sebesar Rp. 10.924.500 ke Balai Penelitian Tanah dengan BAST Nomor B-132/PL.310/H.1.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 berupa Laptop Lenovo 1 Unit, dan ke Balai Penelitian Tanaman Serelia Maros sebesar Rp 941.328.656 dengan BAST Nomor B-133/PL.310/H.1.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 berupa Kendaraan bermotor roda 3 Viar Kaya 300 (2 unit), Kendaraan bermotor roda 3 Viar Karya 200 L (5 unit), kendaraan bermotor roda 3 Viar karya 200 H (1 unit), sepeda motor Nmax (2 unit), sepeda motor Honda (4 unit), lemari besi (5 unit), AC split (4 unit), televisi (1 unit), sound system (1 unit), layar projector (1 unit) dan alat ukur grand moisture tester (5 buah).

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp35.662.092.689,00 dan Rp36.252.150.412,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Balai PATP telah melakukan revisi DIPA sebanyak 9 kali pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dari DIPA awal dikarenakan banyaknya refocusing pandemic covid 19 dan revisi dana PNBP.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 480/Kpts/KP.230/8/2019 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Tahun Anggaran 2021 Nomor: B-01/Kpts/KU.040/H.1.1/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Penandatanganan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai PATP pada tanggal 04 Januari 2021 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ade Rachmat Santosa, S.Sos
Bendahara Pengeluaran	: Hening Kartika S
Bendahara Penerimaan	: Titin Parlina, S.AP